

TINDAKAN PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DIKUTI
PERBUATAN MEREKAM AKTIVITAS SEKSUAL DITINJAU
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

Nama : Priskila Nindy Mellinda
Jurusan/ Program Studi: Hukum/ Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Elly Hernawati, S.H., M.Hum.
II : Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H.

ABSTRAK

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa: “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pada hakikatnya, anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran strategis, serta ciri dan sifat khusus yang membedakannya dari orang dewasa, oleh karena itu anak wajib untuk dilindungi agar terus dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Upaya perlindungan terhadap anak di Indonesia sudah cukup memadai mengingat dalam segala segi hukum yang ada di Indonesia sudah menempatkan kedudukan anak dalam posisi yang khusus, tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak terjadi pengeksploitasian anak yang tidak sesuai dengan hukum. Banyaknya kasus kekerasan terhadap anak perlu menjadi perhatian dan penanganan khusus bagi pemerintah maupun masyarakat demi terwujudnya keadilan bagi anak. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis apakah AAS yang melakukan tindakan persetubuhan terhadap anak dan perbuatan merekam aktivitas seksual dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 29 Undang-Undang Pornografi.

Kata Kunci: Anak, Perlindungan Anak, Kekerasan, Pornografi.

ACTS OF SEXUAL INTERCOURSE WITH CHILDREN AND
FOLLOWED BY THE ACT OF RECORDING THE SEXUAL ACTIVITIES
ARE ACCORDING TO INDONESIAN LAW NUMBER 23 OF 2002
CONCERNING CHILD PROTECTION AS WELL AS LAW
NUMBER 44 OF 2008 ABOUT PORNOGRAPHY

Name : Priskila Nindy Mellinda
Dicipline/ Study Programme: Legal Studies
Contributor I : Dr. Elly Hernawati, S.H., M.Hum.
II : Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H.

ABSTRACT

Article 1 number 2 of the Child Protection Act stipulates that: "The Child Protection are all activities to ensure and protect children and their rights in order to live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity, as well as protection from violence and discrimination". In essence, children as the next generation of the nation have a strategic role, as well as special characteristics that distinguish them from adults, therefore children must be protected so that they can continue to carry out their rights and obligations. The efforts to protect children in Indonesia are sufficient, bearing in mind that in all aspects of Indonesian law already put the children in a special position, but in reality there are still many exploitation of children that are not in accordance with the law. Many cases of violence against children need special attention and treatment for the government and society for the realization of justice for children. This study aims to analyze whether AAS who committed acts of sexual intercourse against children and the act of recording sexual activity may be subject to criminal liability as contained in the provisions of Article 81 paragraph (1) of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and Article 29 of Law Number 44 of 2008 about Pornography.

Keywords: Child, Child Protection, Violence, Pornography.